

The Concept of a Country According To Thought Ibn Bājjah In The Book *Tadbīr Al-Mutawahhīd*

Konsep Negara Menurut Pemikiran Ibn Bājjah Dalam Kitab *Tadbīr Al-Mutawahhīd*

Putri Januarti¹, Ayu Lestari², Khalid al-Walid³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra^{1,2}, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta³

Email: putrijanuarti05@gmail.com,¹ ayulestari.amin@gmail.com,²
kholid.alwalid@uinjkt.ac.id.³

Abstract: *The role of the state in politics is a very complex and interesting issue, especially because the concept of the state has varied meanings and interpretations among experts. Ibn Bājjah, also known as Avempace, was a Muslim philosopher and scientist from western Andalusia who lived in the 11th century. His contribution to Islamic political thought is mainly reflected in his work entitled "Tadbīr al-Mutawahhīd". In this work, Ibn Bājjah examines the concept of the state in two main categories: the perfect (ideal) state and the imperfect state. The aim of this research is to understand the concept of the state according to Ibn Bājjah's thoughts in the book "Tadbīr al-Mutawahhīd" so that it can serve as an inspiration from classical thinking to be applied in a modern context. This research uses a qualitative research model with a descriptive analytical library research approach. The conclusion of this research shows Ibn Bājjah's view of perfect and imperfect states. According to him, a perfect state is one that does not need doctors and judges because there are no conflicts, diseases, or legal problems. On the other hand, imperfect states need doctors (the art of medicine) and judges (the art of law) because there are still conflicts, diseases, and differences of opinion in society.*

Keywords: *Ibn Bājjah, State, Tadbīr al-Mutawahhīd*

Abstrak: *Peran negara dalam politik merupakan isu yang sangat kompleks dan menarik, terutama karena konsep negara memiliki makna dan interpretasi yang bervariasi di kalangan para ahli. Ibn Bājjah, atau dikenal juga sebagai Avempace, adalah seorang filsuf dan ilmuwan Muslim dari Andalusia barat yang hidup pada abad ke-11. Kontribusinya terhadap pemikiran politik Islam terutama tercermin dalam karyanya yang berjudul "Tadbīr al-Mutawahhīd". Dalam karyanya tersebut, Ibn Bājjah mengkaji konsep negara dalam dua kategori utama: negara sempurna (ideal) dan negara tidak sempurna. Tujuan penelitian ini hendak mengetahui konsep negara menurut pemikiran Ibn Bājjah dalam kitab tadbīr al-mutawahhīd sehingga bisa menjadi inspirasi dari pemikiran klasik untuk bisa diterapkan dalam konteks modern. Dalam penelitian ini, menggunakan model dari penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pandangan Ibn Bājjah tentang negara sempurna dan tidak sempurna. Menurutnya, negara sempurna adalah negara yang tidak membutuhkan keberadaan dokter dan hakim karena tidak ada konflik, penyakit, atau masalah hukum. Sebaliknya, negara tidak sempurna memerlukan dokter (seni pengobatan) dan hakim (seni hukum) karena masih ada konflik, penyakit, dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.*

Kata Kunci: *Ibn Bājjah, Negara, Tadbīr al-Mutawahhīd.*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan atau politik yang diatur dalam peraturan hukum Islam. Kata "*daulah*" berasal dari bahasa Arab (*dala-ya'udulu-daulah*) yang memiliki arti bergilir, beredar, dan berputar. Secara istilah, *daulah* mengacu pada suatu perkumpulan yang nyaman di suatu daerah tertentu dan dikoordinasikan oleh suatu pemerintahan yang mengendalikan kemaslahatan dan kepentingannya. Dalam konteks Islam, *daulah* memiliki makna sebagai negara, pemerintahan, atau dinasti.¹

Pada wilayah Islam, prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam di Madinah, dia mendirikan sebuah negara Islam yang mengimplementasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan.²

Sejarah awal Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki kaitan erat dengan kenegaraan. Ketika Islam pertama kali muncul di Arab pada abad ke-7, ajaran Islam tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mencakup pedoman untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai pemimpin agama dan negara, yang mendirikan sebuah negara Islam di Madinah yang mempraktikkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bentuk kebijakan politik.³

Prinsip "Islam adalah agama dan negara (*al-Islām Dīn wa Daulah*)" mencerminkan konsep bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kenegaraan. Oleh karena itu, para pemimpin Islam dianggap sebagai pemimpin agama dan negara yang menggabungkan otoritas keagamaan dan politik dalam satu entitas.⁴

Pada sejarah umat Islam tersebut, tercatat pula banyak perpecahan, pertentangan, dan pertumpahan darah yang dipicu oleh isu-isu politik. Persoalan politik dalam konteks agama sering kali memicu ketegangan antara berbagai kelompok atau faksi di dalam masyarakat

¹ Eka Febriana Putri, *Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi* (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022), p. 1.

² Maskuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), p. 71.

³ Muhammad Yusuf dan Laessach M. Pakatuwo, "Nabi Muhammad SAW; Pemimpin Agama dan Kepala Negara" dalam jurnal *Al-Ubudiyah*, Vol.1 No.2, 2020, p. 30-32.

⁴ Muhammad Yusuf dan Laessach M. Pakatuwo, "Nabi Muhammad SAW; Pemimpin Agama dan Kepala Negara", dalam jurnal *Al-Ubudiyah*, p. 38.

Islam.⁵ Persoalan politik juga memberikan dampak pada pembentukan standarisasi suatu negara yang mulanya negara yang seharusnya dikenal sebagai negara yang sempurna atau ideal, justru menjadi tidak ada batasan karena isu-isu yang dialami oleh masyarakat yang pada umumnya mengalami perubahan sebagaimana diindikasikan oleh perkembangan zaman.⁶

Pada rentang tahun 650 M- 1250 M (Zaman Keemasan Islam), tokoh-tokoh penting seperti Al-Farabi dan Ibnu Rusyd (*Averroes*) turut menjadi pemikir besar dalam sejarah intelektual Islam. Al-Farabi dan Ibnu Rusyd sebagai filsuf dan ilmuwan Muslim, yang turut memberikan kontribusi terhadap pemikiran politik dan kenegaraan dalam tradisi intelektual Islam sehingga bisa mencapai negara yang ideal.⁷

Pada zaman kejayaan ini pula muncul Ibn Bājjah yang menjadi perintis pemikiran Islam dari Andalusia bagian barat sekaligus menjadi topik utama dalam penelitian ini yang juga merumuskan pemikiran politiknya tentang kenegaraan.⁸ Dalam kitabnya yang berjudul “*Tadbīr al-Mutawāḥḥid*“, Ibn Bājjah merumuskan konsep tentang negara yang terbagi menjadi dua jenis: negara “sempurna (ideal)” dan “negara tidak sempurna”. Hal ini menunjukkan pandangan yang menarik dalam konteks pemikiran politik Islam pada masanya.

Metode

Penelitian ini, menggunakan model dari penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer ditelaah melalui sumber informasi pokok, yaitu Kitab *Tadbīr al-Mutawāḥḥid* Ibn Bājjah dan sumber data sekunder adalah Kitab *Tadbīr al-Mutawāḥḥid* Ibn Bājjah, karya Ma’an Ziyadah terjemahan Nanang Tahqiq, buku-buku, skripsi, dan jurnal.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggali lagi konsep negara menurut perspektif Ibn Bājjah mengingat bahwa ia merupakan salah satu pemikir besar dalam sejarah peradaban Islam yang memiliki wawasan mendalam tentang persoalan negara. Pemikirannya yang kaya dan kompleks dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara modern kedepannya.

⁵ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikir Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), p. 1.

⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikir Politik Husain Haikal...*, p. 1-2.

⁷ Abdul Fattah, *Fajar Gemilang Filsafat Islam*, (Malang: Misykat, 2020), p. 12.

⁸ Abdul Fattah, *Fajar Gemilang Filsafat Islam...*, p. 12.

Pembahasan

A. Biografi Ibn Bājjah

Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab dan Spanyol adalah Ibn Bājjah.⁹ *Avempace* adalah nama latinnya, Ibn Bājjah adalah seorang filsuf ilmuwan, yang hidup pada abad ke-11 di Al-Andalusia, wilayah Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan Muslim. Ibnu Bajjah memainkan peran kunci dalam pengembangan pemikiran filsafat di dunia Islam dan Spanyol pada masa itu. Nama lengkapnya adalah ‘Abū Bakr Muḥammad Ibn Yaḥyā Ibn aṣ-Ṣā’ig dan dikenal dengan nama Ibn Bājjah. Karena ia berasal dari keluarga at-Tūjībī, ia juga dipanggil at-Tūjībī karena bekerja sebagai pedagang emas (bajjah/emas).¹⁰ Ia lahir di Saragosa pada 475 H/1085 M.¹¹ Tepat pada tahun 533 H/1138 M di Fez, Ibn Bājjah dibunuh karena diracuni oleh seorang dokter bernama Abū al-'Alā' Ibn Zuhri yang iri dengan ilmu, pengetahuan dan popularitasnya. Ibn Bājjah pun dimakamkan disamping makam Ibn ‘Arabi.¹²

Ibn Bājjah merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam pengembangan pemikiran filsafat pada masa itu. Kepakarannya dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu alam, matematika, astronomi, dan musik menunjukkan kecemerlangannya sebagai seorang intelektual serba bisa. Pengaruh pemikirannya terutama dalam bidang filsafat Aristoteles sangat penting. Pemahamannya tentang karya-karya Aristoteles memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan filsafat di dunia Islam. Tidak hanya itu, pengaruh Ibn Bājjah juga meluas ke pemikir-pemikir berikutnya, termasuk Ibn Rusyd, yang sangat dipengaruhi oleh ide-ide Ibn Bājjah.¹³

Selain itu bahkan Ibn Ṭufail banyak memuji Ibn Bājjah dengan pernyataan "*di kalangan filosof zaman belakangan, Ibn Bājjah adalah yang paling cerdas pemikirannya, paling tepat pandangannya, dan paling benar pendapatnya*". Pujian dari Ibn Ṭufail terhadap Ibn Bājjah menunjukkan pengakuan atas kecerdasan dan ketepatan pemikirannya dalam konteks filsafat pada zamannya. Hal ini menegaskan pentingnya peran Ibn Bājjah dalam perkembangan intelektual dan filsafat di dunia Islam. Selain itu, karya Ibn Bājjah memiliki

⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), p. 157.

¹⁰ Ibn Bājjah, *Tadbīr al-Mutawāḥḥid*, (Tunis: Ceres 1994), p. 3.

¹¹ Ismail, *Buku Daras Filsafat Islam (Tokoh dan Pemikirannya)*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013), p. 60.

¹² Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid...*, p. 4.

¹³ Feri Ferdiawan, *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Ibnu Bājjah...*, p. 52.

nilai sejarah dan intelektual yang signifikan dalam perkembangan pemikiran filsafat Islam dan ilmu pengetahuan pada zamannya.¹⁴ Beberapa karya Ibn Bājjah antara lain:

- a. Risālat al-wadā'
- b. Kitāb Tadbīr al-Mutawahhid
- c. Risālat al-Ittiṣāl al-'Aql bi al-Insan"
- d. Kitāb al-Nafs
- e. Komentār terhadap logika al-Fārābī
- f. Kitāb al-Nabāt
- g. Risālat al-Ghāyah al-Insāniyyah
- h. Tardiyyah.

B. Konsep Negara menurut Ibn Bājjah dalam *Tadbīr al-Mutawahhid*

Kitāb *Tadbīr al-Mutawahhid* adalah salah satu karya penting dalam sejarah pemikiran politik dan filosofis Islam, dan memahaminya dapat memberikan wawasan tentang pemikiran Ibn Bājjah. Kitāb ini merupakan karya yang menghadapi banyak masalah dan tantangan dalam praktik politik pada zamannya. Meski begitu, karya ini mencoba memberikan jawaban atau solusi terhadap berbagai kegagalan yang terjadi dalam ranah politik pada masa itu. Ibn Bājjah menghadirkan konsep pemikiran politiknya dalam bukunya ini, yang mencerminkan pemikirannya tentang negara dan pemerintahan.¹⁵

Adapun pemikiran politik Ibn Bājjah telah dipengaruhi oleh pemikiran al-Fārābī. Meskipun keduanya membahas konsep politik dalam konteks negara utama dan negara yang tidak sempurna, perbedaan terbesar tampaknya terletak pada penekanan mereka pada solusinya. Al-Fārābī lebih menekankan peran kepala negara dalam menciptakan negara utama yang ideal, sementara Ibn Bājjah cenderung menekankan peran masyarakat atau warga negara dalam merancang cara mencapai tujuan tertentu. Ini mencerminkan perbedaan fokus antara dua pemikir ini dalam pemikiran politik mereka.¹⁶

Dalam kitab *Tadbīr al-Mutawahhid*, Ibn Bājjah menjelaskan bahwa Ia yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat tinggal di salah satu dari empat negara yang menurutnya "tidak sempurna". Pengalaman ini mungkin menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya di negara tersebut. Dalam pandangan Ibn Bājjah, ia merasa bahwa ia bukan warga negara yang sesungguhnya dalam negara "tidak sempurna"

¹⁴ Feri Ferdiawan, *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Ibnu Bājjah...*, p. 52-53.

¹⁵ Ma'an Ziyadah, *Kitāb Tadbīr al-Mutawahhid Ibn Bājjah...*, p. 11.

¹⁶ Abdul Kohar. "Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bājjah Dalam Kitab Tadbīr Al-Mutawahhid". *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (June 29, 2020): 69–90. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1806>.

tempat ia tinggal. Ia merasa seperti seorang individu yang berbeda dan tidak sesuai dengan masyarakat di sekitarnya.¹⁷

Ia tunjukkan ketidaksetiaan pada negaranya, sebab ia merasa bukanlah warga negara yang nyata (real) karena ia mempunyai negara versinya sendiri di dalam benak. Masyarakat lain umumnya bahagia jika mereka berada di negara-negara yang tidak sempurna ini, sedangkan *al-Mutawāḥḥid* hanya memiliki kebahagiaan sebagai manusia soliter (penyendiri, sendirian) saja; dan *tadbīr* (pemerintahan) yang sempurna (bagi mereka) pastilah *tadbīr* soliter, terlepas di sana cuma ada satu orang atau lebih, sejauh tidak ada bangsa ataupun negara yang tidak sejalan dengan pandangan dunia mereka. Inilah insan insan yang disebut oleh para sufi sebagai manusia manusia asing. Artinya, sungguhpun mereka hidup di negara negara mereka dan di antara teman-teman dan tetangga, mereka tetaplah menjadi manusia-manusia asing dalam pandangan teman dan tetangga terse-but. Pikiran-pikiran mereka berjalan menuju tingkatan-tingkatan lain, yaitu ke arah negara negara sempurna bagi mereka sendiri.¹⁸

Tampaknya, ia dapat dianggap sebagai tanaman liar yang tumbuh dan berkembang tanpa perawatan atau perhatian, muncul secara tiba-tiba di antara tanaman yang sebelumnya ditanam tanpa diambil atau diperhatikan. Seperti individu-individu yang tidak mengindahkan norma-norma sosial, demikian juga seperti orang-orang yang memiliki gangguan mental, pelaku kejahatan, dan mereka yang menganut paham anarkis, dan ia (filsuf) tidak sepakat dengan pandangan yang dominan dalam masyarakat yang kurang teratur ini. Tak seperti mereka, ia (filsuf), menentang pandangan-pandangan masyarakat yang tidak sempurna, bukan dengan pandangan yang lebih negatif, melainkan dengan pengetahuan yang benar. Meskipun ia hidup di dalam lingkungan masyarakat yang tidak sempurna, namun ia bukanlah warga negara yang sejati dari masyarakat tersebut.¹⁹

Oleh karena itu, *al-Mutawāḥḥid* adalah insan pengecualian dan yang memandang sekelilingnya sebagai pengecualian, menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah terkontaminasi, tidak bersih, tidak alami, dan tidak sehat baginya. Kesimpulan ini didasarkan pada ketidaksempurnaan negara, yang kembali dipicu oleh perilaku warganya yang tidak didasarkan pada pemikiran dan penalaran sebagai alasan utamanya.²⁰

¹⁷Ibn Bājjah, *Tadbīr al-Mutawāḥḥid*, (Tunis: Ceres 1994), p. 13. Lihat juga Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah*, diterjemahkan oleh Nanang Tahqiq (Jakarta: Tuross Pustaka, 2018), p. 12.

¹⁸ Ibn Bājjah, *Tadbīr al-Mutawāḥḥid...*, p. 13.

¹⁹ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah...*, p. 14.

²⁰ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah...*, p. 14.

Ini memberikan hak kepada *al-Mutawahhid* untuk berhenti berharap dan bermimpi tentang adanya negara yang sempurna. Meskipun begitu, sangat jelas bahwa *al-Mutawahhid* tidak boleh menyerah sebelum sepenuhnya memahami kenyataan bahwa hidup di dalam negara yang sempurna adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ibn Bājjah, dengan pendekatan yang relatif realistis, menyadari bahwa harapan untuk hidup di dalam negara semacam itu adalah nol besar atau utopia. Meski demikian, ia berharap agar gagasannya dapat diwujudkan dalam praktik.²¹ Terlebih lagi, Ibn Bājjah sepenuhnya menyadari ketajaman pandangannya. Ia mengakui bahwa manusia secara alami adalah makhluk sosial dan politik, tetapi dia juga menyadari bahwa negara ideal hanyalah suatu idealisasi. Ia memahami bahwa "kesendirian itu buruk," namun pada saat yang sama ia menyadari bahwa "hal tersebut buruk dalam esensinya".²²

Dalam konteks pemikirannya pada karyanya *Tadbīr al-Mutawahhid*, Ibn Bājjah menyadari bahwa konsep negara sempurna atau ideal hanyalah sebuah gagasan atau tujuan yang sulit dicapai dalam dunia yang nyata. Oleh karena itu, ia menciptakan konsep *al-Mutawahhid* sebagai alternatif untuk mencapai kebahagiaan dan kebijaksanaan dalam kondisi yang tidak sempurna. Ibn Bājjah seolah-olah mengatakan bahwa dalam dunia yang tidak sempurna ini, kita perlu mencari cara-cara untuk hidup yang baik dan bermakna, bahkan jika negara atau masyarakat tidak mencapai tingkat kesempurnaan yang ideal.²³

Al-Mutawahhid dapat diterjemahkan dengan istilah seseorang yang hidup sendirian; terpisah dari orang lain; manusia soliter (penyendiri, sendirian) yang tidak berhubungan dengan manusia lain.²⁴ Manusia penyendiri atau *Al-Mutawahhid* dalam pandangan Ibn Bājjah adalah sosok filsuf atau individu yang memilih hidup terasing dari sikap dan perbuatan-perbuatan Masyarakat yang tidak baik. Mereka lebih suka berhubungan dengan ulama dan ilmuwan yang memiliki pandangan dan pengetahuan yang mendalam. Menurutnya, jika seseorang tidak dapat menemukan ulama dan ilmuwan untuk berinteraksi, maka lebih baik mengasingkan diri secara total daripada terlibat dalam pergaulan yang buruk atau merusak.²⁵

Ibn Bājjah menyarankan agar jika seseorang tidak dapat berhubungan dengan ulama dan ilmuwan, mereka sebaiknya berteman dengan orang-orang baik yang selalu mengajak

²¹ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhid Ibn Bājjah*..., p. 14-15.

²² Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhid Ibn Bājjah*..., p. 16.

²³ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhid Ibn Bājjah*..., p. 11.

²⁴ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhid Ibn Bājjah*..., p. 12.

²⁵ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawahhid*..., p. 7-8

pada kebaikan dan menjauhi maksiat. Ia juga menekankan pentingnya berinteraksi dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, karena keyakinan dan nilai-nilai bersama dapat memperkuat keimanannya. Lingkungan sosial dan pertemanan memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Oleh karena itu, penting untuk memilih teman-teman yang memiliki perilaku yang baik dan nilai-nilai yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip moral.²⁶

Sebagaimana kutipan yang disampaikan oleh penyair Zayd Ibn 'Adi al Abbādi menyampaikan pesan penting tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap individu yang menyatakan bahwa:

*“Kita seharusnya tidak hanya mempertimbangkan siapa seseorang, tetapi juga teman-teman dekatnya, karena teman-teman bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepribadian, perilaku, dan nilai-nilai individu.”*²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa *al-Mutawāḥḥid* adalah individu yang hidup secara independen dan tidak terikat oleh ketergantungan pada orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemikiran dan tindakan mereka. Tetapi, sebenarnya Ibn Bājjah menekankan pentingnya individu yang menjadi *Mutawāḥḥid* untuk tetap berhubungan dengan masyarakat namun dengan kemampuan untuk mengatur diri dan menjauhkan diri dari perilaku negatif yang mungkin ada dalam lingkungan masyarakat.²⁸

Sedangkan ungkapan *tadbīr* dalam pemikiran Ibn Bājjah konsep yang juga penting dalam pemikirannya yang menggambarkan pengelolaan atau manajemen tindakan manusia untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Konsep ini hendaknya menyoroti peran manusia sebagai makhluk rasional yang mampu merencanakan, mengatur, dan mengelola tindakan mereka. *Tadbīr* juga bisa digunakan dalam dua pengertian, yaitu pengertian umum (universal) dan pengertian khusus (partikular), menunjukkan bahwa konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks yang berbeda.²⁹

1. *Tadbīr* dalam Pengertian Umum (Universal)

Dalam pengertian umum, *tadbīr* dapat merujuk kepada pengaturan atau pengelolaan hal-hal yang bersifat umum atau luas, seperti aturan-aturan negara atau

²⁶ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid...*, p. 7-8.

²⁷ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid...*, p. 10.

²⁸ Abdul Kohar. “Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bajjah Dalam Kitab Tadbir Al-Mutawahhid”. *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 1 (June 29, 2020): 69–90. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1806>.

²⁹ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid*, 7-8. Dan Ma’an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah*, 19.

rezim negara. Ini mencakup bagaimana pemerintah atau otoritas berusaha mengatur masyarakat secara keseluruhan, menetapkan hukum, dan mengatur kebijakan-kebijakan yang memengaruhi semua warganya.³⁰

2. *Tadbīr* dalam Pengertian Khusus (Partikular)

Dalam pengertian khusus, *tadbīr* dapat merujuk kepada pengelolaan tindakan individu atau *tadbīr* manusia secara individual. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mengelola atau merencanakan tindakan-tindakan pribadinya untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi atau spesifik. Contohnya dapat mencakup bagaimana seseorang mengatur waktu, mengelola keuangan pribadi, atau merencanakan langkah-langkah dalam mencapai tujuan karir atau pendidikan pribadi.³¹

Pemisahan ini menunjukkan bahwa “*tadbīr*” adalah konsep yang dapat diaplikasikan baik dalam skala yang besar seperti pemerintahan negara maupun dalam skala yang lebih kecil seperti pengelolaan tindakan individu. Hal Ini mencerminkan pemikiran holistik Ibn Bājjah tentang bagaimana konsep filosofis dapat digunakan untuk memahami dan mengelola berbagai aspek kehidupan.

C. Klasifikasi Negara menurut Ibn Bājjah

Ibn Bājjah yang dikenal sebagai *Avempace*, adalah seorang filsuf Islam yang memiliki pandangan unik tentang kenegaraan melalui karyanya *Tadbīr al-Mutawahhīd Ibn Bājjah* yang dapat diterjemahkan sebagai "Pemerintahan Orang Mukmin". Konsep ini menunjukkan keyakinan Ibn Bājjah terhadap pemerintahan yang adil berdasarkan pada nilai-nilai moral dan kebenaran. Selain itu, dalam karyanya tersebut Ibn Bājjah membedakan antara dua jenis kota atau negara, berikut adalah penjelasan tentang kedua klasifikasi negara menurut Ibn Bājjah:

1. Negara Sempurna

Konsep negara yang baik atau negara sempurna menurut Ibn Bājjah memiliki banyak kesamaan dengan konsep Plato tentang negara ideal dalam karyanya "*Republik*" Ibn Bājjah menggambarkan negara yang sempurna sebagai tempat di mana warganya hidup dalam persatuan, saling mencintai, dan tidak bertengkar satu sama lain. Tindakan dalam

³⁰ Paul Strathern, Frans Kowa and Deswanto Marboen, *90 menit bersama Aristoteles* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), 33

³¹ Paul Strathern, Frans Kowa and Deswanto Marboen, *90 menit bersama Aristoteles...*, p. 33.

negara ini dianggap tepat dan benar, sehingga masyarakatnya tidak membutuhkan banyak pengobatan.³²

Pandangan Ibn Bājjah tentang negara sempurna menciptakan gambaran masyarakat yang sangat harmonis dan ideal. Dalam pandangannya, negara sempurna dicirikan dengan tidak ada kebutuhan untuk seni pengobatan atau sistem hukum yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang sangat harmonis dan cinta antara warga negara. Perselisihan tidak pernah terjadi, sehingga tidak ada konflik yang memerlukan pengadilan atau hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara di negara sempurna adalah tindakan yang patut dan benar. Ini mencerminkan tingkat kesadaran moral yang tinggi di antara penduduknya, sehingga masyarakat di negara sempurna hidup dalam cinta dan harmoni.³³

Mereka juga tidak mengonsumsi makanan yang berbahaya, menunjukkan bahwa makanan mereka selalu sehat dan sesuai. Masyarakatnya pun memiliki gaya hidup yang sehat dan berolahraga secara teratur yang menghasilkan kesehatan yang baik, sehingga mereka tidak memerlukan pengetahuan tentang pengobatan atau perawatan medis yang rumit. Bahkan jika ada luka atau penyakit ringan, tubuh mereka mampu sembuh dengan sendirinya secara alami. Dengan kata lain, negara sempurna adalah tidak membutuhkan keberadaan dokter dan hakim (ketiadaan dokter dan hakim) karena tidak ada konflik, penyakit, atau masalah hukum.³⁴

Dalam negara sempurna, setiap warga negara diberikan tugas yang sesuai dengan bakat dan persiapan mereka. Seluruh aspek kehidupan di dalam negara sempurna diatur dengan benar, tanpa ada yang keliru. Tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah atau individu, jika sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesempurnaan, dianggap benar secara eksklusif dan mutlak. Ibn Bājjah juga menggarisbawahi bahwa dalam kondisi yang kurang ideal, seperti ketika terjadi korupsi atau tindakan yang mungkin tampak merugikan, tetap dianggap benar jika memiliki alasan atau manfaat tertentu. Contohnya, pengorbanan organ tubuh yang membahayakan dapat berguna dalam kasus tertentu, atau tindakan yang tampak merusak seperti memotong damar tertentu dapat memiliki manfaat medis. Ini mencerminkan pandangan Ibn Bājjah tentang prinsip-prinsip etika dan keadilan yang harus mengatur tindakan di dalam negara sempurna.

³² Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd Ibn Bājjah...*, p. 27.

³³ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd...*, p. 59.

³⁴ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawahhīd...*, p. 10.

Prinsip-prinsip ini diambil dari karya Aristoteles "*Nicomachean Ethics*," yang membahas masalah etika dan moralitas dalam konteks negara yang ideal.³⁵

Dalam pemikiran Ibn Bājjah terciptanya negara yang sempurna bukanlah hasil dari perubahan struktural atau revolusi dalam masyarakat. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa negara yang sempurna hanya dapat terwujud jika individu-individu dalam masyarakat mengalami transformasi internal. Individu harus menyatu dengan akal aktif (*al-āql al-fā'al*)³⁶ dan dapat mengaplikasikannya dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang mampu mencapai penyatuan dengan akal aktif adalah sosok *al-Mutawāḥḥid* yang menyendiri atau terasing dari dunia yang mayoritasnya terdiri dari manusia yang tidak dapat memahami pandangan tentang dunia yang benar-benar dapat dipahami.³⁷ Dalam konteks ini, "sosok yang menyendiri" mengacu pada individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang realitas, yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang dalam masyarakat.³⁸

Filsafat sinkretisme (pemaduan) tentang kesatuan tunggal digunakan Ibn Bājjah untuk menjelaskan konsep realitas *Mutawāḥḥid* (individu yang telah mencapai penyatuan dengan akal aktif). Ia menganggap seseorang yang mencapai tingkat ini sebagai seorang filosof yang sejati (*genuine philosopher*), karena mereka telah mencapai keterhubungan dengan akal aktif. Pandangan ini memiliki keterhubungan dalam pemikiran al-Fārābī, yang juga percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai intelek aktual melalui abstraksi dari intelek potensial. Intelek potensial adalah kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi untuk mencapai intelek aktual, individu memerlukan bantuan cahaya dari intelek aktif.³⁹

Konsep ini disebut juga dengan *a philosophico-ethical program of solution* atau program filsafat etika yang bertujuan untuk keselamatan jiwa. Dalam pandangan ini, mencapai penyatuan dengan akal aktif adalah puncak pencapaian manusia, di mana mereka mencapai pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kebenaran dan kebijaksanaan. Bagi Ibn Bājjah dan al-Fārābī, menjadi filosof yang sejati berarti mencari keterhubungan dengan akal aktif dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang realitas. Selain itu, pandangan ini juga menekankan bahwa individu yang mencapai

³⁵ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid*..., p. 60.

³⁶ Muhammad Abu Ridha, *Rasā'il al-Kindi al-Falsafiah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Rabi, 1990), p. 5-6.

³⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*..., p. 158.

³⁸ Feri Ferdiawan, *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Ibnu Bājjah*..., p. 64-65.

³⁹ Feri Ferdiawan, *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Ibnu Bājjah*..., p. 65

tingkat ini adalah mereka yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip etika dan moralitas, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna.⁴⁰

Kesempurnaan negara dan individu *al-Mutawāḥḥid* dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam dan komunikasi dengan akal aktif, tanpa perlu bergantung pada hukum Tuhan atau perantara agama seperti nabi. Ibn Bājjah juga lebih menekankan filsuf dalam mencapai pemahaman negara sempurna. Menurutnya, para filsuf memiliki kapasitas untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat alam semesta dan kebenaran universal, yang tidak selalu tergantung pada agama atau hukum Tuhan.⁴¹

Namun, Ibn Bājjah menyadari bahwa konsep negara sempurna atau ideal hanyalah sebuah gagasan atau tujuan yang sulit dicapai dalam dunia yang nyata. Meskipun ia merumuskan ide tentang negara yang sempurna dalam pemikirannya, ia juga menyadari kompleksitas dan tantangan dalam menciptakan masyarakat dan pemerintahan yang sesuai dengan gagasan tersebut. Karena dalam kenyataannya, dunia selalu dihadapkan pada ketidaksempurnaan, konflik, perbedaan pendapat, dan tantangan lainnya yang membuat negara sempurna sulit terwujud.⁴²

Lebih lanjut telah dijelaskan kondisi negara sempurna secara lebih spesifik pada *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah*.⁴³ Ibn Bājjah menggambarkan negara sempurna dengan masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat dan mengonsumsi makanan berkualitas. Konsep ini dapat merujuk pada pentingnya menjaga kesehatan dan pola makan yang seimbang. Ibn Bājjah menggambarkan masyarakat dalam negara sempurna berolahraga secara teratur dan memiliki kesehatan yang baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya olahraga dan kebugaran sebagai bagian dari gaya hidup sehat di masyarakat.

Ibn Bājjah menggambarkan jika sakit tubuh mampu sembuh dengan sendirinya secara alami, tanpa perlu pengetahuan medis yang rumit. Hal ini merefleksikan tentang kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan penyembuhan alami, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan sistem medis modern. Ibn Bājjah menggambarkan setiap warga negara diberikan tugas sesuai dengan bakat dan persiapan

⁴⁰ Feri Ferdiawan, *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Ibnu Bājjah...*, p. 65-66.

⁴¹ Ibn Bājjah, *Tadbīr al-Mutawāḥḥid...*, p. 14.

⁴² Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah...*, p. 11.

⁴³ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid...*, p. 59-60.

mereka. Hal ini menggarisbawahi konsep keadilan dan pemberdayaan individu dalam masyarakat yang ideal.

Ibn Bājjah menggambarkan pemerintahan yang efisien dan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dianggap benar secara eksklusif dan mutlak. Hal ini berimplikasi bahwa dalam negara yang sempurna, kebijakan dan tindakan pemerintah selalu berlandaskan pada keadilan dan kesempurnaan. Ibn Bājjah menggambarkan dalam keadaan kurang ideal, tindakan yang mungkin tampak merugikan masih dianggap benar jika memiliki alasan atau manfaat tertentu. Hal ini merefleksikan kesadaran bahwa dalam situasi tidak sempurna, tindakan kompromi atau pengorbanan tertentu mungkin perlu diterapkan untuk mencapai kebaikan Bersama.

Menurut Abdul Kohar, *al-Mutawāḥḥid* juga bisa diartikan sebagai “independent” atau “tidak bergantung”. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemahaman konsep tersebut. Dalam konteks ini, *Tadbīr al-Mutawāḥḥid* bisa digunakan untuk merujuk pada pemerintahan atau negara yang berusaha untuk mandiri dan tidak tergantung pada negara-negara lain. Pemahaman ini bisa sejalan dengan *Tadbīr al-Mutawāḥḥid* Ibn Bājjah jika direfleksikan pada defnisi negara sempurna. Bahwasannya negara yang sempurna adalah yang berupaya untuk mandiri tanpa ketergantungan pada negara-negara lain. Negara yang tergantung pada negara lain cenderung sulit untuk mencapai kemajuan yang sejati dan kesejahteraan yang merata.⁴⁴

Tetapi pada dasarnya negara sempurna menurut Ibn Bājjah bukan hanya sekedar "independen" atau "tidak bergantung". Pandangan Ibn Bājjah tentang negara sempurna menggambarkan sebuah visi yang sangat ideal dan harmonis. Seluruh aspek kehidupan di dalam negara sempurna diatur dengan benar, tanpa ada yang keliru. Dalam pandangannya, negara sempurna dicirikan ketiadaan dokter dan hakim yang menunjukkan bahwa tidak ada penyakit atau konflik di dalam masyarakat tersebut, karena semua warga negara hidup dalam cinta, keharmonisan, dan pemahaman yang sempurna.

Memang benar, pandangan ini sangat idealis dan mungkin sulit diwujudkan sepenuhnya dalam kehidupan nyata. Konflik dan perselisihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan sistem hukum yang kompleks seringkali diperlukan untuk

⁴⁴ Abdul Kohar. “Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bājjah Dalam Kitab Tadbīr Al-Mutawāḥḥid”. *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (June 29, 2020): 69–90. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1806>.

menangani berbagai masalah yang muncul di dalam masyarakat. Seni pengobatan juga merupakan bagian penting dari sistem kesehatan yang diperlukan untuk merawat warga negara yang sakit atau menghadapi tantangan kesehatan lainnya. Karena dalam konteks dunia nyata, masyarakat tidak selalu bebas dari penyakit atau konflik. Kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai tantangan kesehatan dan perbedaan pendapat yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penyediaan layanan medis dan sistem hukum yang adil dan berkeadilan tetap diperlukan dalam masyarakat modern.

2. Negara Tidak Sempurna

Ibn Bājjah mengidentifikasi empat macam negara tak sempurna yang merupakan lawan dari negara sempurna. Ia menciptakan konsep negara yang lebih ideal, yang lebih mendekati pandangan Plato tentang negara yang sempurna seperti yang dijelaskan dalam "*Republik*". Dalam "*Republik*" karya Plato, terdapat konsep negara ideal yang hanya memerlukan satu jenis masyarakat yang terdiri dari para penguasa yang mampu memerintah dengan bijaksana tanpa perlu hukum atau pengobatan. Ibn Bājjah mengambil inspirasi dari konsep-konsep tersebut, dapat dilacak kembali ke pemikiran filsuf Yunani seperti Plato, dalam memahami berbagai jenis negara dan tingkat kekurangsempurnaannya. Dengan demikian, pemahaman Ibn Bājjah tentang negara sempurna dan negara tak sempurna mencerminkan pengaruh pemikiran Plato dan karya lainnya dari filsuf Yunani.⁴⁵

Ia tidak secara rinci membahas negara-negara tak sempurna tersebut. Sebaliknya, ia mengambil inspirasi dari pemikiran Plato dan al-Fārābī dalam merumuskan konsepnya. Pemakaian bahasa dan kosakata yang serupa dengan karya-karya Plato dan al-Fārābī menunjukkan pengaruh yang kuat dari pemikiran Yunani klasik dalam pemikiran politiknya. Ibn Bājjah menyebut tiga nama berikut: "demokrasi," "tirani," "oligarki," dan keempat adalah "*imāmiyyah*". Tiga nama pertama merujuk pada konsep yang umum dalam pemikiran politik klasik (demokrasi, tirani, oligarki), sedangkan yang terakhir, yaitu *imāmiyyah* memiliki makna khusus yang butuh penjelasan. Karena dalam ungkapan arab *imāmiyyah* berkaitan dengan *imām* yang digunakan oleh Ibn Bājjah merujuk pada pemimpin agama.⁴⁶

⁴⁵ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah*, 28.

⁴⁶ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid*, 13-14. Dan Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah*, 28-29.

Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah Ibn Bājjah mengartikan *amāmiyyah* dan bukan *imāmiyyah*, dan itu menyiratkan negara pemimpin atau negara pertama, khususnya negara pertama dan paling tinggi di antara empat negara tak sempurna. Dalam hal ini, pembacaan Miguel Asin Palacios sama sekali tidak memberikan solusi, karena ia membaca *iqāmiyyah* yang merupakan istilah yang sangat asing digunakan untuk negara.⁴⁷ Terjemahan Ibrani atas *Tadbīr al-Mutawahhīd* nampaknya menjawab sampai taraf tertentu, karena penerjemah bahasa (Mūsā al-Narbōnī) mengatakan bahwa secara literal artinya kependetaan (seperti ulama) atau *imāmiyyah*.⁴⁸

Beberapa tanggapan berbeda diberikan oleh Ibnu Rusyd yang menggunakan istilah ini dari waktu ke waktu.⁴⁹ Meskipun demikian, bagian mendasar dari tanggapan ini diperoleh dengan membandingkan negara yang digambarkan kitab *tadbīr* dengan negara tak sempurna dari Plato⁵⁰. *Imāmiyyah* menurut Ibn Bājjah "excellent dalam tindakan dan pikiran" dan "aristokrasi dan monarki" bagi Plato adalah negara terbaik, tapi mungkin "timokrasi" jauh lebih baik. Pada akhirnya keempat negara yang tidak sempurna menjadi lengkap, dan timokrasi berubah menjadi negara yang tak sempurna terakhir.⁵¹

Sementara ciri-ciri empat bentuk negara tak sempurna adalah menggambarkan tingkat kebutuhan akan dokter (seni pengobatan) dan hakim (seni hukum) dalam masyarakat tersebut. Semakin sebuah negara jauh dari ideal negara sempurna, semakin besar kebutuhan akan kedua jenis tenaga ahli ini. Kedokteran dan sistem peradilan menjadi semakin penting negara tak sempurna adalah menggambarkan tingkat kebutuhan akan dokter (seni pengobatan) dan hakim (seni hukum) dalam masyarakat.⁵²

Selanjutnya dalam pemikiran Ibn Bājjah, kepala negara idealnya adalah seorang nabi dalam kasus negara tidak sempurna, Meskipun ia tidak menyebutkan identitas nabi secara terperinci, karena dalam pemikirannya nabi menerima petunjuk/wahyu langsung dari Tuhan melalui akal aktif (*al-āql al-fā'al*).⁵³ Ibn Bājjah percaya bahwa

⁴⁷ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd Ibn Bājjah...*, p. 29.

⁴⁸ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd Ibn Bājjah...*, p. 29.

⁴⁹ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd Ibn Bājjah...*, p. 29.

⁵⁰ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd Ibn Bājjah...*, p. 57.

⁵¹ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd Ibn Bājjah...*, p. 29.

⁵² Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawahhīd...*, p. 14.

⁵³ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawahhīd...*, p. 43-44.

manusia biasa tidak akan mencapai kesempurnaan yang diinginkan dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali di bawah bimbingan seorang nabi atau rasul yang memiliki petunjuk langsung dari Tuhan. Dengan demikian, nabi atau rasul dianggap sebagai pemimpin yang paling baik dan paling berhak untuk mengatur negara dan membuat undang-undang.⁵⁴

Dikaji dalam konteks Indonesia, negara Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dalam mencapai kriteria negara sempurna seperti yang dikategorikan oleh Ibn Bājjah. Dalam konteks Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam klasifikasi "negara tidak sempurna" berdasarkan pemikiran kenegaraan Ibn Bājjah. Karena meskipun telah melakukan banyak kemajuan dalam beberapa bidang, tetapi Indonesia masih menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi dalam mencapai status negara yang sempurna.

Salah satu masalah utama adalah ketimpangan ekonomi yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakpuasan dalam masyarakat, yang dapat memicu konflik sosial. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi nasional, karena mungkin hanya sedikit orang yang memiliki daya beli yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada bidang pendidikan yaitu ketidakmerataan guru di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa daerah, terutama di pedesaan dan pulau-pulau terpencil, seringkali menghadapi kekurangan guru berkualitas. Masalah serupa juga ada dalam sektor kesehatan, beberapa wilayah di Indonesia memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas medis dan tenaga medis yang berkualitas. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya adalah fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Seperti ketidaksetaraan listrik dan air bersih sementara wilayah lainnya mungkin memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan pendapatan dan peluang ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara wilayah-wilayah di Indonesia dapat memengaruhi akses ke layanan dasar seperti transportasi, listrik, dan air bersih. Wilayah yang kurang berkembang mungkin

⁵⁴ Abdul Kohar. "Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bājjah Dalam Kitab Tadbīr Al-Mutawāḥḥid". *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (June 29, 2020): 69–90. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1806>.

memiliki infrastruktur yang lebih terbatas, yang membatasi pertumbuhan ekonomi dan akses ke layanan publik.⁵⁵

Masalah yang tak kunjung terselesaikan juga pada praktik korupsi yang merugikan karena pejabat pemerintah atau individu yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan wewenang mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak perekonomian, melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan, dan menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.⁵⁶

Dalam konteks Indonesia, pandangan Ibn Bājjah tentang negara sempurna menawarkan gagasan idealis yang sulit diwujudkan sepenuhnya. Keragaman tantangan dan kompleksitas kehidupan manusia di Indonesia membuat sulit untuk menciptakan masyarakat yang sepenuhnya harmonis dan bebas dari konflik, penyakit, atau perbedaan pendapat. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan tetap penting. Reformasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan transparan menjadi kunci dalam memajukan Indonesia.

Meskipun pemikiran Ibn Bājjah tidak langsung mengarah pada Indonesia, prinsip-prinsip filosofisnya memberikan wawasan untuk mempertimbangkan reformasi di negara ini. Meskipun tidak mungkin mencapai tingkat keharmonisan yang sama, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan yang penting.

D. Tujuan Negara menurut Ibn Bājjah

Ibn Bājjah memandang bahwa tujuan negara sejalan dengan tujuan hidup manusia karena keduanya berpusat pada masyarakat. Dalam pemikirannya, tujuan hidup manusia di dunia ini adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan ini dapat dicapai melalui usaha dan aktifitas yang berasal dari kemauan bebas dan pertimbangan akal. Ibn Bājjah memahami bahwa manusia memiliki naluri yang mirip dengan hewan, tetapi manusia memiliki kelebihan yaitu naluri insani yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan aktivitas

⁵⁵ Verda Nano Setiawan, 4.700 Desa Belum Teraliri Listrik. Berita yang dipublikasikan website [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) pada 15 Juni 2022. Diakses pada 11 Desember 2023. Lihat di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220615172612-4-347429/4700-desa-belum-teraliri-listrik-begini-jurus-pln>

⁵⁶ *Kepemimpinan dan pemberantasan Korupsi*. Artikel yang dipublikasikan dalam website [bpkp.go.id](https://www.bpkp.go.id) 29 Juli 2004, 00:00. Diakses pada 25 September 2023, pukul 02.15 WIB. Lihat di: <https://www.bpkp.go.id/berita/read/396/10945/Kepemimpinan-dan-Pemberantasan-Korupsi.bpkp>.

dan perbuatan mereka melalui pertimbangan akal, kebebasan, dan naluri insani ini. Dengan menggunakan akal dan kebebasan, manusia dapat mengarahkan tindakan mereka menuju kebahagiaan dan tujuan hidup yang lebih tinggi.⁵⁷

Dalam konteks negara, Ibn Bājjah melihat bahwa negara yang ideal adalah yang menciptakan lingkungan yang mendukung usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan negara, menurut pemikirannya adalah menciptakan masyarakat yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka, mengikuti akal mereka, dan mencapai kebahagiaan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Ibn Bājjah, tujuan negara dan tujuan hidup manusia adalah saling terkait karena keduanya bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana individu dapat mencapai kebahagiaan melalui penggunaan akal dan kebebasan mereka.⁵⁸

Dalam bernegara, tujuan hidup manusia dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Manusia menciptakan bentuk-bentuk korporeal (fisik) seperti sandang, pangan, papan.⁵⁹ Dalam konteks ini, tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan fisik atau material, yang termasuk dalam tujuan hidup yang lebih luas. Menciptakan dan memastikan kebutuhan materi adalah bagian penting dari eksistensi manusia dalam masyarakat. Dalam pemikiran Ibn Bājjah, masyarakat diharapkan untuk menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan material mereka, sehingga mereka tidak bergantung pada orang lain. Hal ini dilihat sebagai langkah menuju terwujudnya negara yang lebih sempurna.⁶⁰
2. Manusia diarahkan menuju bentuk-bentuk spiritual.⁶¹ Dalam kategori ini terdapat perbedaan jenis;
 - a. Bentuk spiritual *sensus communis*. Tindakan ini lebih tinggi karena milik kategori kedua (spiritualitas), tetapi lebih rendah karena milik kategori pertama (korporeal), dan tindakannya bisa diperoleh dan bisa alamiah. Contoh, bahwa busana (pakaian) termasuk dalam kelas alamiah karena merupakan barang fisik, sementara warna baju adalah bagian dari kategori korporeal yang lebih rendah

⁵⁷ M. Samsul Dukah, *Pemikiran Filsafat Politik al-Fārābī dan Ibn Bājjah*, (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 1999), p. 43-44.

⁵⁸ M. Samsul Dukah, *Pemikiran Filsafat Politik al-Fārābī dan Ibn Bājjah...*, p. 44-45.

⁵⁹ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid...*, p. 39.

⁶⁰ Abdul Kohar. "Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bajjah Dalam Kitab Tadbir Al-Mutawahhid". *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (June 29, 2020): 69–90. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1806>.

⁶¹ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah...*, p. 99.

- karena non-fisik. Dan bentuk spiritual *sensus communis*, dalam konteks ini, memahami baik elemen fisik (busana) maupun elemen non-fisik (warna baju) secara bersamaan. Ini menunjukkan pemikiran Ibn Bājjah tentang bagaimana elemen-elemen fisik dan non-fisik dapat berhubungan dalam tindakan manusia.⁶²
- b. Bentuk spiritual fakultas imajinasi atau kemampuan untuk memvisualisasikan dan merasakan emosi tertentu adalah bagian dari jenis tindakan spiritual ini. Contoh menyalakan senjata dalam suasana yang tenang atau mengerutkan dahi.⁶³ Tindakan ini menunjukkan bagaimana tindakan spiritual dapat mengungkapkan emosi atau pikiran yang mendalam, bahkan tanpa peristiwa fisik yang sebenarnya terjadi di lingkungan fisik. Pemahaman dan refleksi atas tindakan-tindakan ini melibatkan aspek spiritualitas dan emosi manusia.
 - c. Bentuk-bentuk fakultas rekolektif. Tindakan ini adalah kemampuan manusia untuk mengingat dan mengambil kembali pengalaman atau informasi dari masa lalu, Contoh, daya ingat. Tindakan ini adalah aspek penting dari aktivitas kognitif manusia dan dapat berkontribusi pada kebahagiaan karena melibatkan refleksi atas pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Tindakan ini dilihat sebagai bagian dari spiritual yang lebih tinggi, karena melibatkan proses internal yang mendalam dan pemahaman tentang pengalaman pribadi. Rekoleksi atau daya ingat dapat membantu manusia dalam proses pembelajaran, pengembangan diri, dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan diri mereka sendiri.⁶⁴
3. Manusia dengan tindakan spiritualitas universal. Ini adalah kategori tertinggi dari tindakan manusia yang mana tindakan tersebut adalah tindakan paling paripurna yang mencerminkan kesucian dan kesempurnaan spiritualitas tanpa campuran unsur korporeal dan disebut sebagai absolut spiritualitas murni. Contoh, mengajar dan menyimpulkan.⁶⁵ Ini adalah tindakan yang secara esensial bersifat spiritual dan dapat membawa manusia ke tingkat pemahaman dan pemikiran yang lebih dalam. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang alam semesta, kebijaksanaan, dan prinsip-prinsip yang lebih besar. Pemahaman ini sesuai dengan gagasan bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan puncak melalui

⁶² Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid*..., p. 41-42.

⁶³ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid Ibn Bājjah*..., p. 101.

⁶⁴ Ma'an Ziyadah, *Kitab Tadbīr al-Mutawāḥḥid*..., p. 103.

⁶⁵ Ibn Bājjah. *Tadbīr al-Mutawāḥḥid*..., p. 44-45.

pemahaman, refleksi, dan pertimbangan yang mendalam, yang pada gilirannya membawa mereka lebih dekat dengan kesempurnaan spiritual.⁶⁶

Tindakan manusia dalam berbagai aspek, baik yang bersifat korporeal, spiritual, maupun universal, menjadi sarana untuk mencapai tujuan negara yang sejalan dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Aspek ini juga menekankan pentingnya pemahaman, refleksi, dan pertimbangan dalam tindakan manusia, serta bagaimana tindakan-tindakan tersebut dapat membawa manusia lebih dekat menuju kebahagiaan dan pemenuhan tujuan hidup.

Dalam karyanya “*Risālat al-Wadā*” Ibn Bājjah juga memberikan 2 (dua) fungsi alternatif negara, yaitu:

- a. Membimbing rakyat menuju tujuan mereka: Fungsi pertama negara adalah untuk menilai perbuatan rakyat dan membimbing mereka dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ini adalah fungsi ideal yang dapat dijalankan di dalam negara yang sempurna, yang dipimpin oleh penguasa yang bijaksana dan berdaulat. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai panduan untuk rakyat dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.
- b. Merancang cara-cara mencapai tujuan tertentu: Fungsi alternatif kedua adalah merancang cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu, mirip dengan seorang penunggang yang mengendalikan kuda. Fungsi ini lebih sesuai untuk negara-negara yang tidak sempurna. Dalam hal ini, pemimpin negara (*raīs*) menerapkan sistem tradisional untuk mengatur tindakan rakyat. Ibn Bājjah menjelaskan bahwa konstitusi atau aturan negara harus disusun oleh kepala negara yang memiliki nilai kejujuran, kompetensi, berlaku adil, berani mengambil risiko, dan lainnya.⁶⁷

Pada hakikatnya, tujuan negara tidak hanya terbatas pada keamanan atau kemerdekaan saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, kesejahteraan, keadilan, keselamatan, dan kebudayaan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa negara seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan warganya.

⁶⁶ Feri Ferdiawan, *Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Ibnu Bājjah...*, p. 76.

⁶⁷ Abdul Kohar. “Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bājjah Dalam Kitab Tadbīr Al-Mutawāḥḥid”. *Politea: Jurnal Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (June 29, 2020): 69–90. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1806>.

Kesimpulan

Ibn Bājjah, atau dikenal juga sebagai *Avempace*, adalah seorang filsuf dan ilmuwan Muslim dari Andalusia barat yang hidup pada abad ke-11. Ia telah memperluas jenjang pendidikannya dari tingkat dasar ke perguruan tinggi. Dan ia telah menjadi seorang sarjana bahasa dan sastra Arab dan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti: ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu musik, ilmu filsafat, dan ilmu kedokteran. Kontribusinya terhadap pemikiran politik Islam terutama tercermin dalam karyanya yang berjudul "*Tadbīr al-Mutawāḥḥid*".

Dalam karyanya tersebut, Ibn Bājjah mengkaji konsep negara dalam dua kategori utama: negara sempurna (ideal) dan negara tidak sempurna. Pandangan Ibn Bājjah tentang negara sempurna menciptakan gambaran masyarakat yang sangat harmonis dan ideal. Dalam visinya, negara sempurna adalah sebuah entitas di mana hubungan antara warganya penuh dengan harmoni dan cinta. Dalam negara ini, tidak ada perselisihan atau konflik yang memerlukan intervensi dari dokter atau hakim. Semua warga negara bertindak dengan cara yang baik dan benar, tanpa ada kebutuhan untuk seni pengobatan (dokter) atau sistem hukum yang kompleks. Kondisi ini mencerminkan tingkat tinggi harmoni sosial dan pemahaman kolektif tentang moralitas yang ada di masyarakat tersebut.

Di sisi lain, dalam negara tak sempurna, gambarnya jauh dari harmoni dan idealisme tersebut. Semakin jauh sebuah negara dari ideal negara sempurna, semakin besar kebutuhan akan dokter dan hakim. Dalam masyarakat yang tidak sempurna, konflik, penyakit, dan pelanggaran hukum sering terjadi, sehingga memerlukan intervensi dari dokter untuk penyembuhan fisik dan hakim untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, semakin buruk keadaan sosial dan moral suatu masyarakat, semakin besar kebutuhan akan kedua jenis tenaga ahli ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Fattah, *Fajar Gemilang Filsafat Islam*, Malang: Misykat, 2020.
- Abdullah, Maskuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Abun-Nasr, Jamil M., *A History of the Maghrib in the Islamic Period*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Bājjah, Ibn, *Tadbīr al-Mutawāḥḥid*, Tunis: Ceres, 1994.

Putri Januarti, dkk: *Konsep Negara Menurut Pemikiran Ibn Bājjah Dalam Kitab Tadbīr Al-Mutawaḥḥid*.

Dukah, M. Samsul, *Pemikiran Filsafat Politik al-Fārābī dan Ibn Bājjah*, Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 1999.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Ismail, *Buku Daras Filsafat Islam (Tokoh dan Pemikirannya)*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013.

Kohar, Abdul, "Politik Islam: Analisis Pemikiran Ibn Bājjah dalam Kitab Tadbīr al-Mutawaḥḥid", dalam *Jurnal POLITEA: Politik Islam*, Vol. 3 No.1, 2020.

Marboen, Paul Strathern, Frans Kowa, dan Deswanto, *90 menit bersama Aristoteles*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.

Mulia, Musdah, *Negara Islam Pemikir Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Pakatuwo, Muhammad Yusuf dan Laessach M., "Nabi Muhammad SAW; Pemimpin Agama dan Kepala Negara" dalam jurnal *Al-Ubudiyah*, Vol.1 No.2, 2020.

Putri, Eka Febriana, *Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi*, Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022.

Ridha, Muhammad Abu, *Rasāil al-Kindi al-Falsafiah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Rabi, 1990.

Setiawan, Verda Nano, 4.700 Desa Belum Teraliri Listrik, cnbcindonesia.com.

Ziyadah, Ma'an, *Kitab Tadbīr al-Mutawaḥḥid Ibn Bājjah*, diterjemahkan oleh Nanang Tahqiq, Jakarta: Tuross Pustaka, 2018.